



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

Jl. Indra Budiman No. 12 Lampulo, Banda Aceh 23127
Telepon : (0651) 6303980, Fax (0651) 6303149, Email : psdkp.lampulo@kkp.go.id

Nomor : B.661/PSDKPLan.1/TU.210/IV/2025 17 April 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo
Triwulan I Tahun 2025

Yth. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
di
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran triwulan I tahun 2025, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025, berikut berkas terlampir dalam link Google Drive yang dapat diakses melalui tautan: <https://drive.google.com/drive/folders/18T017wz7dsVRUsa6rAJMorCokMThlmoS>.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Lampulo



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Quddus

Tembusan:
Sekretaris Ditjen. PSDKP



2025

LAPORAN KINERJA PANGKALAN PSDKP LAMPULO

TRIWULAN I TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

25TH KKP
SABUK SAUDARA
WITH BLUE ECONOMY

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025 memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama tahun 2025, dari aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini, juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Banda Aceh, 14 April 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Perikanan dan Kelautan Lampulo



Abdul Qudus

The image shows a circular official stamp of the Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo. The stamp contains the text: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DIREKTORAT JENDERAL, PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO, and PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA. A handwritten signature is written over the stamp, and the name 'Abdul Qudus' is printed below it.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025. UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2025. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pada tahun 2025 terdapat 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang harus dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami keberhasilan pencapaian target terhadap 23 indikator kinerja selama tahun 2025. Hasil capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2025 diperoleh sebesar 107,10 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2025 sebesar Rp 15.584.727.000,00 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Delapan Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Maret 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 3.283.331.577,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 20,66%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
1. Bidang Perikanan Tangkap	2
2. Bidang Perikanan Budidaya	3
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	3
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	3
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	3
6. Bidang Kawasan Konservasi	4
7. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut.....	4
D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo.....	4
1. Tugas Pokok dan Fungsi	4
2. Struktur Organisasi.....	5
E. Sistematika Penyajian	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2025	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Tahun 2025	16
1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025	16

2. Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025.....	16
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	18
SK 1.1: Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	18
ISK 1.1.1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”	18
SK 1.2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif.....	19
ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”	19
ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasi <i>Speed Boat</i> Pengawas”	22
SK 1.3: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	26
ISK 1.3.1: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”	26
SK 2.1: Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan.....	27
ISK 2.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan”	27
SK 3.1: Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan.....	33
ISK 3.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan”	33
SK 4.1: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Sesuai Ketentuan.....	39
ISK 4.1.1: “Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	39
SK 4.2: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	41
ISK 4.2.1: “Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	41
SK 5.1: Tata Kelola Pemerintah yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP	42
ISK 5.1.1: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	42
ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI Lembar Verifikasi Hasil Pendataan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	44
ISK 5.1.3: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”	45

ISK 5.1.4: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko”	46
ISK 5.1.5: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	47
ISK 5.1.6: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	49
ISK 5.1.7: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”	50
ISK 5.1.8: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”	51
ISK 5.1.9: “Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	52
ISK 5.1.10: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	53
ISK 5.1.11: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	54
ISK 5.1.12: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	55
ISK 5.1.13: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	56
ISK 5.1.14: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	57
C. Akuntabilitas Keuangan	58
BAB IV. PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Rekomendasi	60
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo	5
Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025	13
Tabel 3.1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025.....	16
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Triwulan I Tahun 2025.....	17
Tabel 3.3. Hasil Capaian ISK 1.1.1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”	19
Tabel 3.4. Hasil Capaian ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”	21
Tabel 3.5. Rincian Komponen Capaian ISK 1.2.1: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”	21
Tabel 3.6. Hasil Capaian ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas” ...	23
Tabel 3.7. Rincian Komponen Capaian ISK 1.2.2: “Indeks Kinerja Operasi <i>Speed Boat</i> Pengawas”.....	
Tabel 3.8. Hasil Capaian ISK 1.3.1: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”	26
Tabel 3.9. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan	27
Tabel 3.10. Hasil Capaian 2.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan”	31
Tabel 3.11. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	32
Tabel 3.12. Rincian Komponen Pengawasan Rutin Berbasis OSS	34
Tabel 3.13. Rincian Komponen Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur	35
Tabel 3.14. Rincian Komponen Pengawasan Importasi Hasil Perikanan.....	35
Tabel 3.15. Rincian Komponen Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Program Prioritas Nasional	36
Tabel 3.16. Rincian Komponen Pengawasan Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan	37
Tabel 3.17. Rincian Komponen Pengawasan Insidental.....	38
Tabel 3.18. Hasil Capaian ISK 3.1.1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan”	38
Tabel 3.19. Rincian Penyelesaian Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	38
Tabel 3.20. Hasil Capaian ISK 4.1.1: “Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”....	40

Tabel 3.21. Rincian Hasil Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	40
Tabel 3.22. Hasil Capaian ISK 4.2.1: “Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikaan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	42
Tabel 3.23. Hasil Capaian ISK 5.1.1. “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	43
Tabel 3.24. Hasil Capaian ISK 5.1.2: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	44
Tabel 3.25. Hasil Capaian ISK 5.1.3: “Nilai WBK Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	45
Tabel 3.26. Hasil Capaian ISK 5.1.4: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	46
Tabel 3.27. Hasil Capaian ISK 5.1.5: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	48
Tabel 3.28. Hasil Capaian ISK 5.1.6: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	50
Tabel 3.29. Hasil Capaian ISK 5.1.7: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	51
Tabel 3.30. Hasil Capaian ISK 5.1.8: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	52
Tabel 3.31. Hasil Capaian ISK 5.1.9: “Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Pangkalan PSDKP Lampulo”	53
Tabel 3.32. Hasil Capaian ISK 5.1.10: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	54
Tabel 3.33. Hasil Capaian ISK 5.1.11: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	55
Tabel 3.34. Hasil Capaian ISK 5.1.12: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	56
Tabel 3.35. Hasil Capaian ISK 5.1.13: “Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	57

Tabel 3.36. Hasil Capaian ISK 5.1.14: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	58
Tabel 3.37. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo s.d. Triwulan I Tahun 2025	59
Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam dokumen perencanaan kinerja (Perjanjian Kinerja dan RKA-KL).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan selama tahun 2025 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, dan evaluasinya.

C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) Strategi Ekonomi Biru sebagai langkah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dunia, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
- 2.) Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
- 3.) Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 4.) Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
- 5.) Program “Bulan Cinta Laut” dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Terjadi peningkatan jumlah dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2.) Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.
- 3.) Penyadartahuan terhadap POKMASWAS sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Kegiatan pembongkaran ikan tidak pada pelabuhan pangkalan yang menyebabkan tidak terdatanya hasil tangkapan dengan tepat, sehingga tidak sesuai dengan program penangkapan ikan terukur. Selain itu, data hasil tangkapan yang tidak diinformasikan dengan benar memicu terjadinya pemalsuan data penangkapan ikan terukur dan penerimaan PNBP jadi berkurang.

- c. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Aceh Barat, Simeulue, Sibolga, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan di laut;
- e. Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan penangkapan ikan;
- f. Adanya konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl di Bengkulu dan Aceh Barat.

2. Bidang Perikanan Budidaya

Isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belum semua pelaku usaha pembudidayaan ikan menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah IPAL yang dimiliki oleh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan belum memenuhi standar IPAL yang seharusnya. Masih terdapat pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro kecil yang belum menerapkan standar kelayakan pengolahan (SKP).

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum terdapatnya hasil perikanan yang terdistribusikan dan daerah distribusi hasil perikanan;
- b. Adanya dugaan beredarnya ikan yang merupakan komoditas impor pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang tidak sesuai peruntukan;
- c. Masih maraknya distribusi benih bening lobster (BBL) yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat; dan
- c. Belum dilengkapinya PKKPR oleh para pelaku usaha.

6. Bidang Kawasan Konservasi

Masih banyak pelaku usaha di kawasan konservasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan memasuki zona inti dari kawasan konservasi.

7. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

Masih terdapat pelaku usaha dan pemerintah yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang belum melengkapi PKKPR dan KKKPR.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo

1. Tugas Pokok dan Fungsi

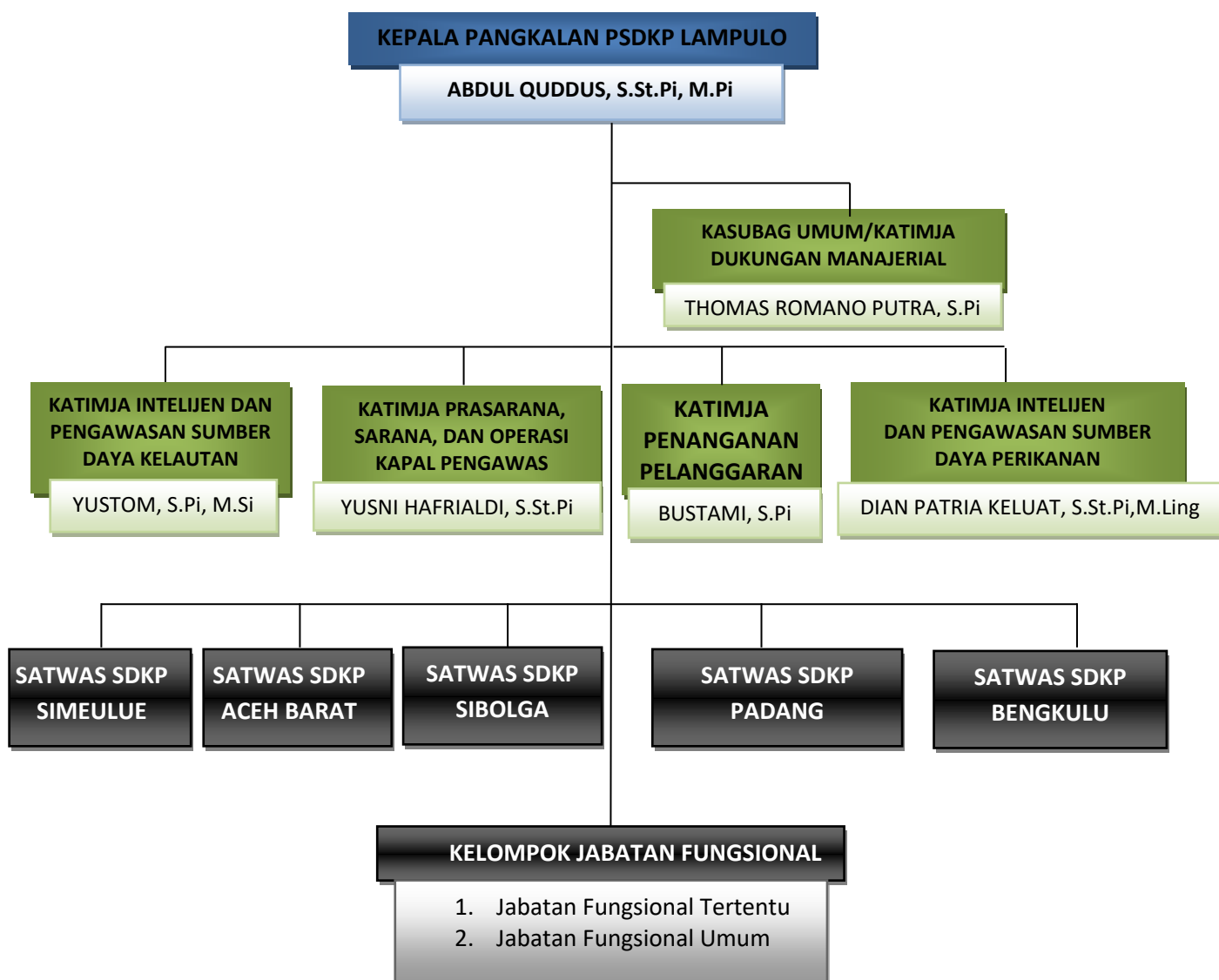
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum dengan anggota kelompok Ketua Tim Kerja yang terdiri dari jabatan fungsional tertentu (JFT) dan kelompok jabatan fungsional umum (JFU). Penunjukkan Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja dibuktikan dengan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor: B.354/PSDKPLan.1/KP.440/II/2025 tentang Susunan Keanggotaan tim Kerja lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo tanggal 14 Februari 2025. Adapun gambaran terkait Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Pangkalan

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Pangkalan, yaitu merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Sub Bagian Umum, yaitu melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keluarga, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan.

c) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

Koordinator Pelaksana Fungsional, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

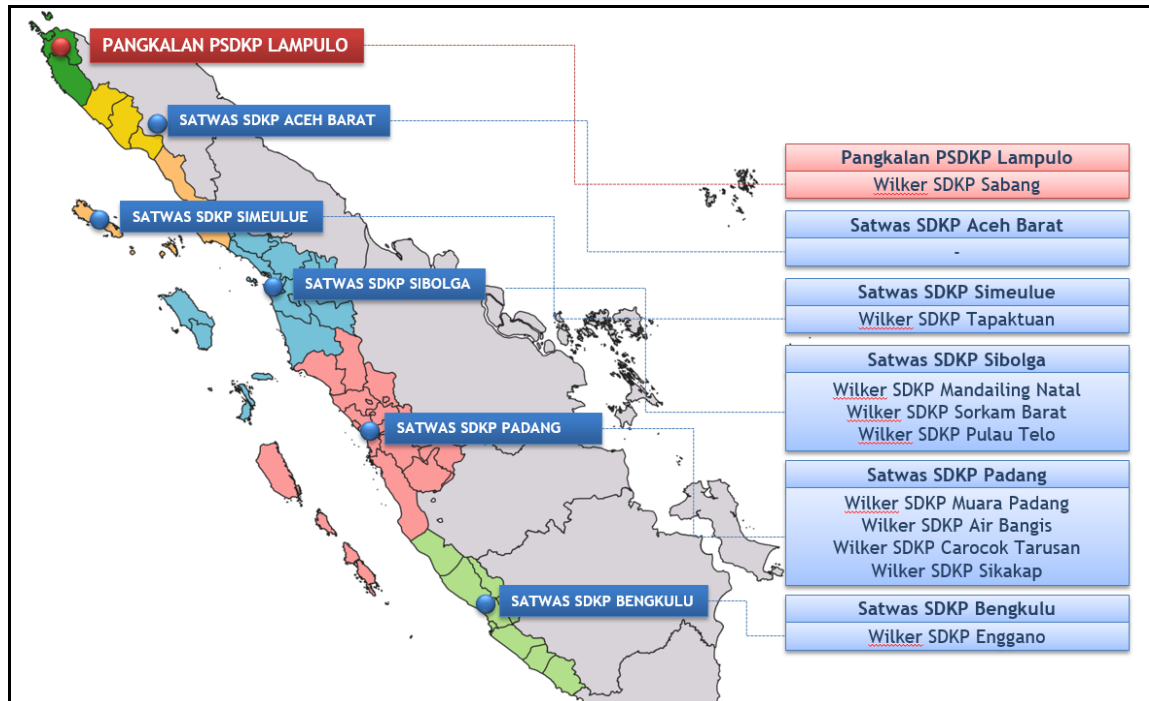
d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e) Satuan PSDKP

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan Pengawasan PSDKP, merupakan unit organisasi non-struktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Koordinator Satuan Pengawasan.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan PSDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan PSDKP dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, yang meliputi 5 Satuan PSDKP dan 10 Wilayah Kerja PSDKP, yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Unit Kerja serta data umum UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Pangkalan PSDKP Lampulo untuk periode 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

5. Bab V Lampiran

Menyajikan lampiran yang berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Kerja; dan (2) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis implementasi kerangka berfikir logis.

A. Kegiatan Pengawasan SDKP

Rumusan kegiatan tingkat UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, yang merupakan turunan dan fungsi eselon II Ditjen PSDKP. Meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaram Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pangkalan PSDKP Lampulo.

Selain kegiatan di atas, Pangkalan PSDKP Lampulo juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung Program Ekonomi Biru Menteri Kelautan dan Perikanan. Kebijakan Ekonomi Biru untuk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, antara lain:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota;
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendaian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada Tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka sesuai jenjang hirarki UPT Pangkalan PSDKP Lampulo diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja.

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK 1	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	1	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		2	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
SK 2	Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	3	Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		4	Persentase prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		5	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK 3	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	6	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		7	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81
SK 4	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	94
SK 5	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	9	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai)	75
		10	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai)	75
SK 6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	11	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100
SK 7	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	12	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100
SK 8	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	13	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK 9	Tata Kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14	Nilai kinerja perencanaan anggaran satker lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	71,5
		15	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	92
		16	Indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	81
		17	Penilaian mandiri SAKIP satker lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	92
		18	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	86
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		20	Nilai kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	88,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		21	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	80
		22	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP (inovasi)	1
		23	Nilai impelementasi program budaya kerja (nilai)	70

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dan IKM dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya, nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB III

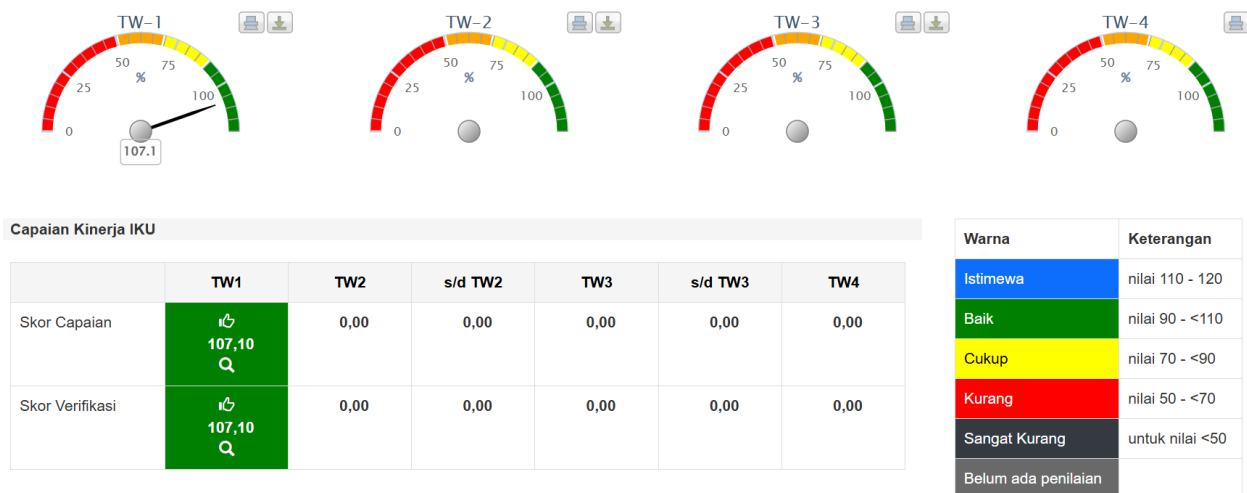
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Tahun 2025

1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Nilai Capaian Kinerja IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Hasil capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 107,10 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik). Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo triwulan I tahun 2025, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau.

2. Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TW I	CAPAIAN	PERSEN
SK 1	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	1	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	-	-	-
		2	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	-	-	-
SK 2	Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	3	Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	-	-	-
		4	Persentase prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	-	-	-
		5	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	-	-	-
SK 3	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	6	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81	81	100%
		7	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81	81	100%
SK 4	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	-	-	-
SK 5	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	9	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai)	-	-	-
		10	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai)	-	-	-
SK 6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	11	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100	100	100%
SK 7	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	12	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100	100	100%
SK 8	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	13	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	-	-	-
SK 9	Tata Kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14	Nilai kinerja perencanaan anggaran satker lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	-	-	-
		15	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	-	-	-
		16	Indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	-	-	-
		17	Penilaian mandiri SAKIP satker lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	-	-	-
		18	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	100	100	100%
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	100	105,26%
		20	Nilai kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	88,5	93,70	105,88%
		21	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	-	-	-
		22	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP (inovasi)	-	-	-
		23	Nilai impelementansi program budaya kerja (nilai)	-	-	-

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama triwulan I tahun 2025, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

SK 3: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan”, diidentifikasi ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 6: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
- c) Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Terdapat kriteria dalam penghitungan capaian pada IK 6, antara lain:

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Hasil pengukuran capaian IK 6: “Indeks Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan” pada triwulan I tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.3. Hasil Capaian IK 6: “Indeks Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan”

IKU	Target TW I 2025	Realisasi	Persentase
Indeks Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan	81	81	100%

Pada triwulan I tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 6 dengan nilai indeks sebesar 81, telah tercapai nilai sebesar 81, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Perolehan nilai capaian indeks berdasarkan data hasil pengenaan sanksi administratif kelautan dan perikanan SPKP dan Non SPKP. Adapun rincian perolehan nilai tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Rincian Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan SPKP

NO	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)						ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT							CAPAIAN
	TRANSHIPMENT	PELARUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12NM)	ZONA KONSERVASI	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SUPERVISI/EKSPOSE	SP1	SP2	DENDA	
1	1	1	5	55	6	68	1	67	26	14	27	0	0	0	0	65%

Tabel 3.5. Rincian Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan Non SPKP

NO	SANKSI ADMINISTRATIF SDK					SANKSI ADMINISTRATIF SDP				CAPAIAN
	SP1	SP2	SP3	PAKSAAN PEMERINTAH	DENDA	SP1	SP2	PAKSAAN PEMERINTAH	DENDA	
1	1					13			1	100%

Hasil perhitungan pengenaan sanksi administratif kelautan dan perikanan SPKP dan Non SPKP kemudian dihitung rata-rata, sehingga diperoleh nilai sebesar 83%. Nilai tersebut masuk dalam kriteria nilai indeks 81, sehingga target dapat tercapai 100%.

Hasil capaian terhadap IK 6 pada triwulan I tahun 2025 mengalami keberhasilan pencapaian target. Adaoun faktor keberhasilan yaitu Tim Kerja Penanganan Pelanggaran aktif melakukan internalisasi kepada PPNS, Pengawas Perikanan, Awak Kapal Pengawas, dan Polsus PWP3K agar dapat melaksanakan tugas secara professional, sehingga pemeriksaan dan penetapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target pada IK 6, yaitu dengan membangun sinergitas dengan stakeholder terkait.

IK 7: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh:

- a) Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili;
- b) Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau
- c) Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Hasil pengukuran capaian IK 7: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” pada triwulan I tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.6. Hasil Capaian IK 7: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

IKU	Target TW I 2025	Realisasi	Persentase
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	81	81	100%

Pada triwulan I tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target IK 7 dengan nilai indeks sebesar 81, telah tercapai nilai indeks sebesar 81, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Adapun rincian perolehan nilai indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Rincian Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan SPKP

NO	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)						ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT							CAPAIAN
	TRANSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12NM)	ZONA KONSERVASI	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SUPERVISI/EKSPOSE	SP1	SP2	DENDA	
1	1	1	5	55	6	68	1	67	26	14	27	0	0	0	0	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai capaian pemeriksaan SPKP sebesar 100%, masuk ke dalam kriteria nilai indeks 81. Hasil perolehan nilai indeks telah memenuhi target sebesar 81, sehingga diperoleh realisasi capaian pada IK 7 sebesar 100%.

Hasil capaian IK 7 pada triwulan I tahun 2025 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor keberhasilan pencapaian terget karena Pangkalan PSDKP Lampulo aktif dalam menindaklanjuti hasil indikasi pelanggaran dengan melakukan BAP terhadap pelaku usaha. Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap indikasi pelanggaran. Selain itu, Pangkalan PSDKP Lampulo juga aktif melakukan koordinasi dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran agar pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SK 6: Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 11: “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan”

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu.

Komponen indikator terdiri dari:

- nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Bobot: 45%),
- nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS (Bobot: 40%),
- nilai penyelesaian pemeriksaan insidental (Bobot: 15%)

Hasil pengukuran capaian IK 11: “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan” pada triwulan I tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.8. Hasil Capaian IK 11: “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan”

IKU	Target TW I 2025	Realisasi	Persentase
Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan	100	100	100%

Pada triwulan I tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo meentukan target pada IK 11 dengan nilai indeks sebesar 100% telah tercapai nilai indeks sebesar 100, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%.

Rincian objek sumber daya kelautan yang diawasi Pangkalan PSDKP Lampulo pada triwulan I tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Rekapitulasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025

No.	Bulan	OBJEK PENGAWASAN						Pencemaran
		Kawasan Konservasi Perairan	Ruang Laut	Jenis Ikan Dilindungi	Jasa Kelautan	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Destructive Fishing</i>	
1	Januari							
2	Februari		3 Pelaku Usaha					
3	Maret		1 Pelaku Usaha					
TOTAL		-	4 Pelaku Usaha	-	-	-	-	-

Rekapitulasi pengawasan sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada triwulan I tahun 2025, dilakukan terhadap 4 (empat) pelaku usaha pengelolaan ruang laut. Hasil pemeriksaan telah memenuhi kriteria data dukung sehingga dapat diperoleh nilai capaian sebesar 100%.

Hasil capaian IK 11 pada triwulan I tahun 2025 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor keberhasilan pencapaian target, yaitu Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan rapat perencanaan terkait objek pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan dapat terkoordinir. Selain itu, Tim Kerja Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan juga aktif dalam melakukan internalisasi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara profesional.

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyesuaian penggunaan anggaran, sehingga kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

SK 7: Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 12: “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan”

Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan merupakan nilai rata – rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diperiksa.

Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari:

- 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsector perikanan dalam OSS;
- 2) pengawasan operasional kapal perikanan;
- 3) pengawasan importasi hasil perikanan; dan
- 4) pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat)

Hasil pengukuran capaian IK 12: “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan” pada triwulan I tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.10. Hasil Capaian IK 12: “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan”

IKU	Target TW I 2025	Realisasi	Persentase
Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan	100	100	100%

Pada triwulan I tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 12 dengan nilai indeks sebesar 100, telah tercapai nilai indeks 100, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%.

Rekapitulasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada triwulan I tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Rekapitulasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025

No	Kegiatan	Output	Nilai	Keterangan
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)	10	Pemeriksaan dilakukan terhadap 1 Pelaku Usaha Insidental UPI, 460 Penerbitan HPK Kedatangan, dan 467 Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung	70	
3	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	Laporan kepatuhan, dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit	20	
Total Nilai			100	

Rekapitulasi pengawasan terhadap pelaku usaha sumber daya perikanan pada triwulan I tahun 2025 dilakukan terhadap 1 Pelaku Usaha Insidental UPI, 460 Penerbitan HPK Kedatangan, dan 467 Penerbitan HPK Keberangkatan.

Hasil capaian IK 12 pada triwulan I tahun 2025 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor keberhasilan pencapaian target pada IK 12, yaitu Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan rapat perencanaan terkait objek pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan dapat terkoordinir. Selain itu, Tim Kerja Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan juga aktif dalam melakukan internalisasi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara profesional.

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyesuaian penggunaan anggaran, sehingga kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

SK 9: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, diidentifikasi ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Manajerial (IKM), yaitu:

IK 18: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko, meliputi:

- 1) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi,
- 2) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja,
- 3) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Hasil pengukuran capaian IK 18: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP” pada triwulan I tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.12. Hasil Capaian IK 12: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP”

IKM	Target TW I 2025	Realisasi	Persentase
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%	100%	100%

Pada triwulan I tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 18 dengan nilai presentase sebesar 100%, telah tercapai nilai presentase sebesar 100%, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Pangkalan PSDKP Lampulo dalam Menyusun 3 rencana pengendalian risiko, telah tercapai sebanyak 3 realisasi pengendalian risiko, sehingga capaian IKU MR diperoleh sebesar 100%.

Hasil capaian IK 18 pada triwulan I tahun 2025 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian target pada IK 18, yaitu dengan melakukan identifikasi setiap skala risiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan berjalan, untuk kemudian dituangkan ke dalam form kendali agar menjadi perhatian bersama. Selain itu, ditentukan Langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir adanya risiko tersebut. Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu dengan melakukan koordinasi yang intensif antara operator MR dengan Kepala Pangkalan dan para Katimja, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo agar berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

IK 19: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal. Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

Hasil pengukuran capaian IK 19: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada triwulan I tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.13. Hasil Capaian IK 12: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

IKM	Target TW I 2025	Realisasi	Persentase
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	95%	100%	105,26%

Pada triwulan I tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 19 dengan nilai persentase sebesar 95%, telah tercapai nilai 100% sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 105,26%. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2025 Pangkalan PSDKP Lampulo sebagaimana disampaikan dalam Surat Penyampaian Nomor: B.1437/DJPSDKP.1/TU.140/IV/2025, jumlah rekomendasi yang ditetapkan sebanyak 2, telah ditindaklanjuti sebanyak 2. Pangkalan PSDKP Lampulo telah tuntas menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. Adapun rincian tindak lanjut hasil rekomendasi Itjen pada triwulan I tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ketidaksesuaian Volume Pekerjaan	01.1.3	1.	Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada PPK agar memerintahkan Pelaksana Pekerjaan (CV Yonetta Cahaya Kelbi) dan Konsultan Pengawas (CV Mitra Zela Konsultan) untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan ulang terhadap kelebihan volume pekerjaan senilai Rp13.256.662,50 dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp59.494.397,64 berdasarkan kondisi terpasang dan selanjutnya dilakukan addendum kontrak berupa penambahan/pengurangan volume pekerjaan serta dialihkan pada pekerjaan lain sesuai kebutuhan teknis.	0.00	28 FEBRUARI 2025 Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat dinas Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo kepada Inspektur II Nomor B.1791/PSDKPLan.1/TU.210/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 Hal Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Pembangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Padang pada Pangkalan PSDKP Lampulo 2. Surat Instruksi Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo kepada PPK Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor: B.1790/PSDKPLan.1/HM.150/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 3. Addendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Kantor Satwas SDKP Padang Nomor : 0757/PSDKPLan.1/PL.421/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024	0.00	TUNTAS
Terdapat Spesifikasi Teknis Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak	01.1.8	2.	Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada PPK agar menginstruksikan Pelaksana Pekerjaan (CV Yonetta Cahaya Kelbi) dan Konsultan Pengawas (CV Mitra Zela Konsultan) untuk melengkapi justifikasi teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan berkonsultasi dengan Konsultan Perencana untuk memperhitungkan kekuatan struktur terkait perbedaan spesifikasi teknis tersebut. (	0.00	28 FEBRUARI 2025 Telah ditindaklanjuti dengan JUSTIFIKASI TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK	0.00	TUNTAS

Hasil capaian IK 19 pada triwulan I tahun 2025 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target adalah dengan aktif melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama yang baik antar pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi Itjen.

IK 20: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP”

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:

- U1-Persyaratan Layanan
- U2-Kemudahan Prosedur
- U3- Waktu Penyelesaian
- U4-Kesesuaian Biaya
- U5-Kesesuaian Produk
- U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas
- U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas
- U8-Layanan Konsultasi
- U9-Kualitas Isi/Sarana

Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:

>88,31 : Sangat Baik

76,61-88,30: Baik

65,00-76,60: Kurang Baik

25,00-64,99 : Tidak Baik

Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I, II, I II, dan IV).

Hasil pengukuran capaian IK 20: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP” pada triwulan I tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.14. Hasil Capaian IK 12: “Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP”

IKM	Target TW I 2025	Realisasi	Persentase
Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5	93,70	105,88

Pada triwulan I tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 20 dengan nilai indeks sebesar 88,5 telah tercapai nilai indeks sebesar 93,70 sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 105,88%. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada triwulan I tahun 2025 diperoleh melalui Aplikasi SISUSAN, yaitu sebagai berikut:



50 Data terakhir Tw 1/2025, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

15 entries per page

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responder
psdkp	Pangkalan PSDKP Tual	2025	1	4,74	93,22	43
psdkp	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	2025	1	4,94	95,35	104
psdkp	Stasiun PSDKP Cilacap	2025	1	4,71	89,37	69
psdkp	Pangkalan PSDKP Lampulo	2025	1	4,67	93,70	15
psdkp	Pangkalan PSDKP Batam	2025	1	4,67	83,91	97

Hasil capaian IK 20 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada IK 20, yaitu adanya peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sehingga nilai indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik. Selain itu, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo juga berperan aktif menjadi *role model* dalam internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada seluruh Pelayan Publik sehingga dapat memupuk kesadaran dan aktualisasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yang lebih profesional. Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target, yaitu adanya peningkatan fasilitas yang terdapat pada ruang pelayanan sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna layanan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2025 sebesar Rp 15.584.727.000,00 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Delapan Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Maret 2025, anggaran telah terserap sebesar Rp 3.283.331.577,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Ratus Tia Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 20,66%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI.

Rincian realisasi anggaran dan perkembangan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Triwulan I Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	4.514.970.000	231.570.100	5,13%
2351	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	49.385.000	5.022.360	10,17%
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	189.367.000	49.655.180	26,22%
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan Sektor Kelautan dan Perikanan	0	0	0%
2355	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.141.005.000	2.997.083.937	26,90%
Jumlah		15.584.727.000	3.283.331.577	20,66%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penyusunan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Lampulo berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan 11 Indikator Kinerja Utama dan 14 Indikator Kinerja Manajerial pada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang melekat pada 8 (sepuluh) Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama tahun 2025 sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025

No.	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perlu meningkatkan kedisiplinan pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo	Adanya catatan jam datang dan jam pulang pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo
2.	Perlu meningkatkan pengetahuan pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo	Melakukan kegiatan <i>Sharing Session</i> bagi pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo yang menerima bimtek/diklat.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Quddus

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

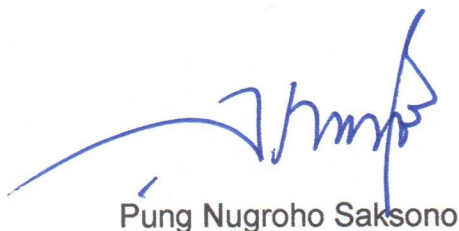
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA

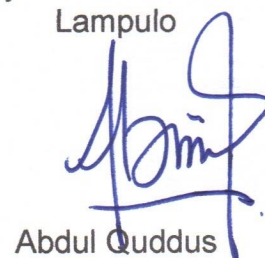
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo



Abdul Quddus

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK 1	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	1	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		2	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
SK 2	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	3	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		4	Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		5	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK 3	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	6	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		7	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
SK 4	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
SK 5	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	9	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
		10	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
SK 6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	11	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
SK 7	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	12	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
SK 8	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	13	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK 9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP	71,5
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92
		16	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	81
		17	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP	86
		18	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100

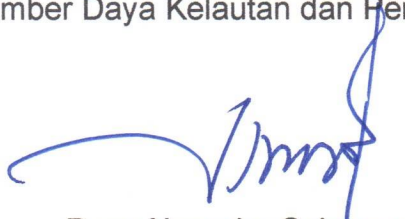
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		20	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5
		21	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	80
		22	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	1
		23	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	18.055.548.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	256.615.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.634.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	300.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	14.762.992.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025		35.009.622.000

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo



Abdul Quddus